

# PERAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM OPTIMALISASI TPB/SDGs PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

Raffi Akbar Prasetyo

NPP. 31.0474

Asdaf Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: [akbarraffi824@gmail.com](mailto:akbarraffi824@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Ali Hanafiah Muhi, MP

## ABSTRACT

**Problems Statement/Background (GAP):** Sustainable Development Goals (SDGs) are development that ensures continuous improvement in the economic welfare of society, development that maintains sustainability, environmental quality and ensures justice. SDGs in Salatiga City are carried out by Bappeda officials. In general, this has been implemented well, but there is a gap between targets and realization in the Bappeda SDGs and LKjIP performance reports. **Purpose:** The aim of this research is to find out what role ASN Bappeda has in terms of SDGs and to find out the efforts and obstacles faced by ASN Bappeda in implementing SDGs in Salatiga City. **Method:** This research uses qualitative research methods with data collection methods through interviews, observation and documentation. The data that has been collected is processed in three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** The research results show that the implementation of the SDGs carried out by ASN Bappeda is quite optimal in its implementation. The roles of Bappeda are coordination, planning, control and evaluation. There are many obstacles that exist in regional apparatus organizations that are implementers. Various efforts have been made by ASN Bappeda to overcome these various obstacles. **Conclusion:** The conclusion from this research is that the role of ASN Bappeda has not been maximized in carrying out its role seen from the various obstacles faced by ASN Bappeda in optimizing the SDGs. The suggestions given by researchers are related to optimizing the role of ASN Bappeda, making SDGs regulations and outreach to the community.

**Keywords:** SDGs, ASN, Role

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan. SDGs di Kota Salatiga dilakukan oleh Aparatur Bappeda hal ini secara umum sudah dijalankan dengan baik akan tetapi terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang ada pada laporan kinerja SDGs dan LKjIP Bappeda. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran yang dimiliki oleh ASN Bappeda dalam hal SDGs dan mengetahui upaya serta hambatan yang dihadapi oleh ASN Bappeda dalam menjalankan SDGs di Kota Salatiga. **Metode:** Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah dalam tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelaksanaan *SDGs* yang dilaksanakan oleh ASN Bappeda sudah cukup optimal dalam pelaksanaannya. Peran yang dimiliki oleh Bappeda yaitu koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Hambatan yang ada pada organisasi perangkat daerah yang menjadi pelaksana banyak mengalami hambatan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh ASN Bappeda untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran yang dimiliki oleh ASN Bappeda belum maksimal dalam melaksanakan perannya dilihat dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh ASN Bappeda dalam optimalisasi *SDGs*. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti terkait optimalisasi dalam peran ASN Bappeda, pembuatan peraturan *SDGs* dan sosialisasi terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** *SDGs*, ASN, Peran

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkomitmen untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (*SDGs*). TPB/*SDGs* adalah kerangka pembangunan yang bertujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, memperhatikan keberlanjutan kehidupan sosial, mempromosikan peningkatan kualitas lingkungan, serta menegakkan keadilan dan tata kelola yang memungkinkan peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam *SDGs* sendiri terdapat 17 komitmen global yang harus diwujudkan oleh negara yang berupaya mewujudkan hal tersebut. Upaya pencapaian target TPB/*SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Target dari TPB/*SDGs* di tingkat nasional diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) baik untuk periode 2015-2019 maupun periode 2020-2024.

TPB/*SDGs* merupakan evolusi yang lebih komprehensif dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), melibatkan berbagai negara baik maju maupun berkembang, meningkatkan sumber pembiayaan, menekankan pada hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), media, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pakar. Indonesia telah berhasil mencapai sejumlah target MDGs, mencapai 49 dari 67 indikator yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang harus terus diperjuangkan dalam upaya merealisasikan TPB/*SDGs*. TPB/*SDGs* di Kota Salatiga sudah cukup baik, tetapi secara keseluruhan jika ditinjau dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) masih ada yang belum mencapai target yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga (Bappeda) (Pemerintah Kota Salatiga, 2021).

Bappeda adalah Badan yang mempunyai tugas dalam penelitian, pengembangan serta pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda sendiri mempunyai tugas salah satunya yaitu melakukan tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap kinerja dari pelaksanaan TPB/*SDGs*. Tugas yang dimiliki oleh Bappeda penting untuk dilakukan dengan baik karena perencanaan yang dalam TPB/*SDGs* sudah tidak baik maka dalam pelaksanaan juga akan terjadi banyak hambatan. Dalam merencanakan TPB/*SDGs* Bappeda Kota Salatiga menentukan target agar tujuan yang ada dapat terealisasi dengan baik. Terdapat 16 tujuan yang perlu diwujudkan sesuai target yang telah dibuat. Target pada setiap tujuan dari TPB/*SDGs* berbeda presentase yang ditentukan melihat dengan lingkungan yang ada di Kota Salatiga. Setiap tujuan memiliki beberapa indikator yang dimana di setiap indikator juga berbeda untuk capaian targetnya. Dari ke-16 tujuan tersebut Kota Salatiga berdasarkan

laporan kinerja *SDGs* tahun 2021 masih ada 9 dari 16 indikator belum optimal atau masih ada yang belum mencapai target. Selain itu, berdasarkan LKjIP.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

TPB/*SDGs* di Salatiga masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah Kota Salatiga. Indikator tersebut karena adanya kesenjangan antara target dengan realisasi yang dilakukan. 9 dari 16 TPB di Kota Salatiga masih belum optimal dalam pelaksanaannya. 9 indikator tersebut adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota dan permukiman berkelanjutan, kesetaraan gender, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang Tangguh serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari ke-9 indikator tersebut masih belum sesuai antara target yang ditentukan oleh Bappeda dan realisasi yang dilakukan.

Selain itu, hal tersebut tidak lepas dari kinerja aparatur di Bappeda Kota Salatiga. Pelaksanaan TPB/*SDGs* ini juga dipengaruhi aparatur Bappeda khususnya pada bidang perencanaan kesejahteraan rakyat. Kinerja Bappeda dapat dilihat dari LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) pada data terlihat bahwa kinerja dari Bappeda sudah baik. Akan tetapi, masih ada beberapa indikator kerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Ada indikator dari kinerja Bappeda yang mengalami penurunan hingga 20%. Hal itu menjadikan peneliti ingin mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh Aparatur Bappeda dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam pelaksanaan TPB/*SDGs* ini.

## 1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang menggunakan konsep peran secara umum maupun *SDGs*. Pertama, penelitian oleh I Wayan Sutrisna dengan judul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (*SDGs*) Desa menemukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di desa melalui peran strategis dan transparansi pemerintahan di desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan di desa masih perlu diperkuat dan ditingkatkan (Sutrisna, 2021). Kedua, penelitian oleh Rina Rizki Amalia dan Jehan Ridho Izharsyah dengan judul Fungsi Directing Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program *SDGs* (Sustainable Development Goals) di Desa Tani Makmur Rengat Barat peneliti menemukan bahwa peran kepala desa pada realisasi program *SDGs* di Desa Tani Makmur Rengat Barat telah sesuai dengan fungsinya. Kepala desa memiliki peran sebagai monitor dan mengarahkan program serta kegiatan yang sedang dilaksanakan di wilayahnya untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan (Amalia dan Ridho Izharsyah, 2022). Ketiga, penelitian oleh Icha Permatasari, Novriest Umbu W. Nau dan Putri Hergianasari dengan judul Peran NGO Dalam Mendukung *SDGs* Pendidikan Berkualitas (Studi Kasus: Project Child Indonesia Di Yogyakarta (2018-2022) dengan hasil penelitian Peran NGO, khususnya Project Child Indonesia, dalam mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), terutama di bidang pendidikan di Yogyakarta, telah sesuai dengan kontribusinya dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah bantaran sungai Yogyakarta (Permatasari dkk., 2018). Keempat, judul penelitian Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (*SDGs*) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara oleh Rizky Alfino Nialda, Johannis E. Kaawoan dan Stefanus Sampe dengan hasil penelitian peranan Dinas Tenaga Kerja dalam mewujudkan sustainable development goals

pekerjaan layak belum dapat dikatakan optimal karena peran dari Dinas Tenaga Kerja terlihat masih kurang responsif dalam mewujudkan hak pekerja terkait dengan Hak Pekerja terkait dengan upah dan jam kerja dan Perlindungan Sosial terkait dengan jaminan sosial (Alfino Nialda dkk., 2022). Kelima, Peran Literasi Digital dalam Mencapai *SDGs* 2030 sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan oleh Larisa Qisty Kamil, Rifa Alya Maitsa dan Ichsan Fauzi Rachman, M.Pd. menemukan bahwa Literasi digital berperan krusial dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) yang diamanatkan oleh PBB dengan kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi digital (Ekonomi dkk., 2024).

Keenam, Peran Panglima Laot dalam Menerapkan Sustainable Development Goals (*SDGs*) pada Bidang Kelestarian Laut Digampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie oleh Iza Nudia dan Mirza Desfandi menemukan bahwa salah satu penerapan program *SDGs* yang dilakukan secara tidak langsung oleh panglima laot adalah melalui metode penangkapan ikan yang biasa mereka lakukan yaitu penangkapan ikan menggunakan metode tradisional dengan menggunakan kail pancing (Nudia & Desfandi, 2023). Ketujuh, Peran Generasi Z Dalam Mewujudkan *SDGs* Di era Society 5.0 : Peran Generasi Z Sebagai Agent Of Change Dalam Mencapai Era Society 5.0 oleh I Kadek Agus Aditya Putra, I Putu Rai Purna Wibawa, I Made Ode Subawa dan Ni Komang Sutrisni, S.H., M.H dengan hasil penelitian Peran Gen Z di Era Society 5.0 Gen Z diharapkan untuk dapat mempunyai integritas yang tinggi sehingga dapat selaras dengan peran yang akan dipikul sebagai agen perubahan di era Society 5.0 nanti (Sutrisni dkk., 2022). Kedelapan, Peran BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pencapaian *SDGs* Desa oleh Erasmus Humanika, Agung Trisusilo dan Risqi Firdaus Setiawan menyatakan bahwa Peran BUMdes tidak hanya menjadi wadah untuk meningkatkan perekonomian desa, namun dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa, kehidupan sosial masyarakat desa, meningkatkan pembangunan di desa, serta mengelola lingkungan di pedesaan (Humanika dkk., 2023). Kesembilan, Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (*SDGs*) Desa di Kabupaten Wajo oleh Umi Kalsum, Nurlinah dan Andi Lukman Irwan mendapatkan hasil peran dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) sudah berjalan, namun masih sangat minim. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan pengelola BUMDes (Kalsum & Lukman Irwan, 2023). Kesepuluh, Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Implementasi Sustainable Development Goals oleh Sindi Aulia Nasution dan Retno Sayekti hasil penelitian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Selatan relevan dengan tujuan dari *SDGs* pada poin pertama, yaitu ikut serta untuk meminimalisir kemiskinan, hal itu berdasarkan penyediaan koleksi dan kegiatan pelatihan kreativitas masyarakat (Nasution & Sayekti, 2023).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Pada penelitian ini ingin mengetahui peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Salatiga yang dimana dari lokasi penelitian belum ada di penelitian sebelumnya. Selain itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Levinson dalam Soekanto (2012) yang dimana terdapat 3 dimensi untuk mengetahui bagaimana peran dari Bappeda tersebut dalam *SDGs*.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana peran Aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam optimalisasi *SDGs*

di Kota Salatiga selain itu untuk mengetahui juga hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Aparatur Bappeda.

## II. METODE

Penelitian ini dirancang dalam pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian kualitatif juga akan diterapkan dengan mengumpulkan beragam tipe data, yaitu seperti yang diterapkan dalam penelitian ini: wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumenasi dengan menggunakan data primer dan sekunder. Wawancara dilakukan dengan 5 informan yang dikira peneliti paham mengenai *SDGs* yang menjadi permasalahan pada penelitian ini. Adapun dalam menguji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2019). Selain itu, untuk menganalisis data penulis menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Peran Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga dalam Optimalisasi TPB/*SDGs* di Kota Salatiga

Aparatur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga memiliki peran penting dalam *SDGs* di Kota Salatiga. Peran yang dimiliki oleh Bappeda adalah sebagai perencana, monitoring dan evaluasi yang dimana hal tersebut dilakukan oleh pegawai Bappeda. Peneliti menggunakan konsep peran berdasarkan pendapat Levinson (dalam Soekanto, 2012) yang menyebutkan bahwa peran aparatur di Bappeda ini dikaitkan dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. disebutkan bahwa mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu peran adalah norma, peran adalah suatu konsep dan peran adalah perilaku individu, peran aparatur dalam hal ini adalah dalam merencanakan, mengendalikan, mengawasi dan membuat laporan evaluasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik.

#### 3.1.1 Peran adalah Norma

Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan public goods, sektor publik sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam hal ini regulasi pada pelaksanaan *SDGs* sangat perlu adanya untuk keberlangsungan *SDGs* agar lancar dan sesuai dengan napa yang ada diperaturan. Di Bappeda sendiri belum ada regulasi yang dibuat oleh Bappeda terkhusus *SDGs* ini tetapi ada aturan yang dibuat oleh Bappenas mengenai *SDGs* yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh aparatur yang ada di Bappeda. Selain itu, dalam penyusunan tiap indikator yang ada di *SDGs* menggunakan Peraturan Walikota No 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. RPD ini digunakan untuk menyusun setiap indikator yang ada di dalam *SDGs* ini karena indikator yang ada dalam *SDGs* harus selaras dengan RPD/RPJMD tiap masing-masing daerah yang ada.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai *SDGs* harus dijalankan oleh Bappeda sebagai salah satu pelaku *SDGs*. Aparatur yang ada di Bappeda sebagai pelaku

*SDGs* dalam hal ini menjalankan beberapa peraturan yang telah dibuat salah satunya oleh Bappenas mengenai RAD *SDGs*. Seperti halnya Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.136/M.PPPN/HK/12/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Tahun 2021-2024. Aparatur di Bappeda sudah menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai *SDGs* dengan baik. Regulasi atau kebijakan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Sejauh ini untuk lingkup internal dari aparatur Bappeda tidak ada yang melanggar yang sampai mendapatkan surat peringatan terkait kebijakan yang ada. Pelanggaran yang ada hanya mendapat teguran dari atasan yang memberi tugas apabila tugas yang dikumpulkan terlambat. Kebijakan yang dibuat diluar internal pegawai Bappeda juga untuk OPD yang melaksanakan *SDGs* ini.

### 3.1.2 Peran adalah Konsep

Peran yang dimiliki Bappeda dalam *SDGs* ini sangat penting karena tanpa adanya peran aparatur Bappeda *SDGs* tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada 4 peran yang dimiliki oleh Bappeda dalam *SDGs* ini yaitu koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Keempat peran tersebut harus berjalan seiringan tanpa adanya tumpang tindih satu sama lain agar semua tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda dapat terlaksana dengan baik. Fungsi yang pertama yaitu sebagai koordinator dalam hal kemitraan dengan lembaga lain. Kemitraan yang dilakukan oleh Bappeda dalam *SDGs* ini menggunakan *Multi Stakeholder Partnership* tidak konvensional yang dimana dalam melakukan kemitraan tidak harus menggunakan *MoU* hanya melalui kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak kedua. Hal ini sudah dilakukan dengan beberapa universitas yang ada di Salatiga seperti halnya Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Islam Negeri Salatiga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA dan dengan Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. Perencanaan yang dilakukan oleh Aparatur di Bappeda dalam hal *SDGs* ini dilakukan melalui Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga ke OPD yang kemudian dipertemukan di Musrenbang Kota. Setelah Musrenbang kota selesai dilakukan perencanaan pembangunan dan penyatuan dari sisi eksekutif dan legislatif serta merumuskan anggaran yang akan digunakan pada tahun tersebut. Peran pengendalian yang dilakukan oleh Aparatur Bappeda adalah dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan tiap triwulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana progres yang dimiliki oleh tiap pelaksana *SDGs* tiap triwulannya yang kemudian nanti dibuat laporan kinerja yang dilaporkan pada tahun berikutnya

Laporan kinerja *SDGs* pada tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami kenaikan pada tiap indikator yang dimana hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang baik pada *SDGs* ini. Dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Laporan Kinerja TPB/*SDGs* Tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Salatiga**

No	Indikator <i>SDGS</i>	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanpa Kemiskinan	4,84	4,94	4,74	5,14	4,7	4,73
2	Tanpa Kelaparan	14	9,58	12	11,84	10	6,21
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11,5	10,94	11	12,34	10,75	10,25
4	Pendidikan Berkualitas	95	99,2	99	98,93	100	95,70
5	Kesetaraan Gender	0,02	0,01	0,02	0,037	0,02	0,05

No	Indikator <i>SDGS</i>	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	92	100	99,61	100	100	98,04
7	Energi Bersih dan Terjangkau	-	-	PM	98,24	PM	100
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5,83	7,44	5,78	7,26	5,73	5,58
9	Industri, Inovasi dan infrastruktur	91	93,71	92	93,75	97,75	99,2
10	Berkurangnya Kesenjangan	4,84	4,94	4,74	5,14	4,7	4,73
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	91,84	99,78	92,73	96,27	93,62	93,94
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	PM	1	PM	1	PM	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	PM	Belum	1	1	1	1
14	Ekosistem Laut	-	-	-	-	-	-
15	Ekosistem Daratan	-	-	-	-	-	47,28
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	PM	129	PM	94	PM	123
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	PM	68,7	PM	68,7	-	-

Sumber: *Data Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga diolah oleh Penulis (2024)*

Berdasarkan data laporan kinerja diatas dapat dilihat peran yang dilakukan oleh Aparatur di Bappeda sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada karena laporan yang dibuat tiap tahun sudah ada dan berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan untuk pembuatan laporan kinerja *SDGs* setiap tahun. Selain itu, peran dalam perencanaan setiap indikator juga sudah sesuai dengan apa yang telah di tetapkan diregulasi yang dimana ada 17 goals 116 indikator tetapi 116 indikator tidak dimasukkan semua karena pada 2 tahun terakhir mulai tahun 2022 sudah bisa penyesuaian indikator.

### 3.1.3 Peran adalah Perilaku Individu

Aparatur dalam mengatur berbagai kegiatan produksi penjualan barang atau jasa, *public good and quasi public goods*. Sejak ditetapkannya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai badan yang diberi tanggung jawab mengenai *SDGs*, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah membuktikan beberapa keberhasilan Bappeda dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan *SDGs*. Dalam hal ini juga tidak lepas dengan adanya penyelenggaraan pelayanan publik yang dimana Bappeda merupakan lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur yang merupakan tugasnya dalam memberikan sebuah pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Sebagai organisasi pemerintahan yang bergerak dibidang pembangunan Bappeda wajib melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Pelayanan publik wajib dilakukan dengan baik yang dimana itu tercantum dalam motto pelayanan yang dimiliki oleh Bappeda yaitu "Pegawai yang Profesional, Produktif dan Inovatif". Produk pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Bappeda berupa pelayanan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dan pelayanan informasi publik. Kedua hal tersebut dilakukan oleh Aparatur Bappeda guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar pembangunan yang ada di Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ekpektasi masyarakat Kota Salatiga. Kedua pelayanan tersebut juga memiliki masing-masing prosedur dalam pelaksanaannya yang

diatur oleh Bappeda yang wajib ditaati juga oleh masyarakat. Dalam menilai keberhasilan pelayanan publik Bappeda melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dibuat setiap tahun 2 semester dengan hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) . pada tahun 2023 semester II dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 1**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat Bappeda Kota Salatiga 2023**

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga	
NILAI IKM	Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga
<b>81,60</b>	<p style="text-align: center;">RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 49 responden            PERIODE SURVEI : Oktober s.d Nopember 2023            LOKASI SURVEI : Kota Salatiga</p>

Sumber: *Website Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga*

Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat di Bappeda Kota Salatiga selama satu periode mulai bulan Oktober sampai dengan Nopember 2023 dapat disimpulkan. Pelaksanaan pelayanan publik di Bappeda secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan indek kepuasan masyarkat 81,6. Untuk indikator-indikator dengan kategori pelayanan kinerja baik, maka perlu di tingkatkan lagi.

### **3.2 Faktor Penghambat dalam Optimalisasi TPB/SDGs di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa penghambat yang dialami oleh Aparatur yang ada di Bappeda dalam optimalisasi *SDGs* di Kota Salatiga, sebagai berikut:

1. Kekurangan pegawai yang membuat tugas pokok dan fungsi Bappeda tidak berjalan maksimal dan membuat beban kerja yang dimiliki oleh Aparatur Bappeda bertambah.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program *SDGs* yang membuat masyaraat sebagai faktor pendukung bingung karena tidak mengetahui ap aitu *SDGs*.
3. Ketidaksalarasan program prioritas antara eksekutif dan legislative dalam musrenbang tingkat kota.
4. Anggaran DAU yang terbatas karena anggaran yang ada sudah ditetapkan untuk apa saja dan untuk *SDGs* sangat terbatas.
5. Proses evaluasi kepada OPD pelaksana yang jenuh membuat lambatnya pelaporan kepada Bappeda yang menjadikan hambatan dalam penyusunan laporan.
6. Pemikiran pejawab yang memikirkan *fee* dalam kolaborasi dengan pihak ketiga untuk *SDGs*.



### **3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk Mengatasi Hambatan dalam Optimalisasi *SDGs***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada dilakukan upaya oleh Aparatur Bappeda sebagai berikut:

1. Bappeda meminta usulan formasi untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada tersebut.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, para dewan dan OPD pelaksana terkait *SDGs*.
3. Peningkatan kompetensi pegawai Bappeda melakukan usul diklat melalui Si Jari On milik BKPSDM untuk meningkatkan kompetensi pegawai Bappeda.
4. Bappeda mendorong OPD pelaksana untuk dapat mengerjakan program *SDGs* dengan baik dan apabila ada masalah Bappeda membantu cari jalan keluar.
5. Bappeda melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk mengatasi adanya keterbatasan anggaran.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas mengenai peran yang dimiliki oleh Aparatur Bappeda dalam *SDGs*, yang dimana pada penelitian ini membahas dan fokus kepada peran yang dimiliki oleh Aparatur Bappeda dalam optimalisasi *SDGs* di Kota Salatiga. Peran yang dimiliki oleh Aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga dalam *SDGs* ini sudah cukup optimal. Peran yang dimiliki Aparatur Bappeda dalam hal ini adalah koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi. 4 peran yang dimiliki oleh Bappeda sangat penting untuk keberhasilan *SDGs*. Dalam hal ini peran yang dilakukan Bappeda sudah optimal akan tetapi terdapat masalah di OPD pelaksana yang membuat laporan kinerja *SDGs* Kota Salatiga yang dibuat oleh Bappeda menjadi turun. Hal itu menjadi temuan utama peneliti dalam penelitian ini. Selain itu, belum adanya peraturan terkait *SDGs* menjadi salah satu hambatan untuk optimalnya hasil *SDGs* di Kota Salatiga. Peraturan sangat penting adanya untuk keberlangsungan pekerjaan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, Pemerintah Kota Salatiga juga kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat karena ternyata banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai *SDGs*. Pentingnya pengetahuan masyarakat terkait *SDGs* ini agar masyarakat juga tau apa saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik**

Peneliti menemukan faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Aparatur Bappeda dalam optimalisasi *SDGs* di Kota Salatiga. Faktor penghambatnya yaitu kekurangan pegawai yang ada di Bappeda, kurang sosialisasi terkait *SDGs* oleh OPD pelaksana dan Kelurahan kepada masyarakat, ketidakselarasan program prioritas eksekutif dan legislatif dalam Musrenbang, anggaran yang terbatas, pelaksana *SDGs* yang jenuh dengan proses evaluasi yang ada, dan kurang terbuka pemikiran pimpinan terkait kolaborasi dengan lembaga eksternal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Aparatur Bappeda untuk mengatasi beberapa hambatan berikut yaitu Bappeda meminta usulan formasi untuk mengisi kekosongan tersebut tetapi sebelum ada yang mengisi jabatan tersebut Bappeda membagi beban kerja kepada pegawai yang lain dengan beban kerja yang sama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, para dewan dan OPD pelaksana terkait *SDGs*, meningkatkan kompetensi pegawai untuk menunjang tewujudnya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan baik, bappeda sebagai

koordinator mendorong OPD pelaksana untuk dapat mengerjakan program *SDGs* dengan baik dan dalam pelaksanaannya ada kendala Bappeda mencarikan berbagai jalan keluar; dan melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengambilan data untuk *SDGs*.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang Peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Optimalisasi *SDGs* di Kota Salatiga, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Aparatur Bappeda dalam optimalisasi *SDGs* pemerintah menempatkan peran yang penting yaitu dalam Koordinasi, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. 4 peran tersebut menurut peneliti sudah dilakukan Aparatur Bappeda cukup optimal karena berdasarkan pembahasan yang telah peneliti tulis Bappeda memiliki banyak keunggulan terakit *SDGs* ini. Terkait adanya naik turun atau tidak stabil dalam hal target dan realisasi yang ada di laporan *SDGs* tersebut kembali lagi ke OPD pelaksana yang dimana Bappeda hanya menjadi koordinator dengan melaksanakan segala regulasi yang ada. Tetapi masih terdapat masalah yang dimana regulasi belum ada terakit *SDGs* yang dibuat oleh Aparatur Bappeda Kota Salatiga. Selain itu, Bappeda juga dalam pelayanan publik dilakukan sudah baik sesuai dengan IKM yang telah ada masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bappeda.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Waktu yang diberikan pada penelitian ini terbilang singkat sehingga menjadikan salah satu hambatan dalam penelitian ini tetapi peneliti dapat memanajemen waktu dengan baik.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti sadar masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti berharap untuk ada yang melakukan penelitian lebih lanjut terkait Peran yang dimiliki oleh Aparatur Bappeda dalam optimalisasi *SDGs* ini. Selain itu, harapan besar peneliti bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan evaluasi terkait peran yang dimiliki oleh Aparatur Bappeda agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan *SDGs* terkhususnya di Kota Salatiga.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Salatiga yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian terkait peran Aparatur Bappeda dalam optimalisasi *SDGs* di Kota Salatiga. Terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku dan Karya Ilmiah

- Alfino Nialda, R., Kaawoan, J. E., & Sampe, S. (t.t.). Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (*SDGs*) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL GOVERNANCE*, 2(1), 2022.
- Amalia<sup>1</sup>, R. R., & Ridho Izharsyah<sup>2</sup>, J. (2022). Fungsi Directing Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program *SDGs* (Sustainable Development Goals) di Desa Tani Makmur

- Rengat Barat The Directing Function Of The Village Head In The Implementation Of The *SDGs* (Sustainable Development Goals) Program In Tani Makmur Rengat Barat Village. *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 1(1), 38–45.
- Ekonomi, J., dan Akuntansi, M., Qisty Kamil, L., Alya Maitsa, R., & Fauzi Rachman, I. (2024). *Neraca* (Vol. 220, Nomor 5). <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Jawa Timur 2 Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian. Dalam *Universitas Bengkulu Jurnal AGRIFO* • (Vol. 8, Nomor 2).
- Jhon W. Creswell. 2014. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kalsum, U., & Lukman Irwan, A. (t.t.). *Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kabupaten Wajo*.
- Nasution, S. A., & Sayekti, R. (2023). Peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam implementasi sustainable devolepment goals. *Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 11(1), 13. <https://doi.org/10.18592/pk.v11i1.9231>
- Nudia, I., & Desfandi, M. (2023). Peran Panglima Laot Dalam Menerapkan Sustainable Development Goals (*SDGs*) Dalam Bidang Kelestarian Laut Di Gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 8(1.1), 104–114. <https://doi.org/10.24815/jpg.v8i1.1.31873>
- Pemerintah Kota Salatiga. 2021. *Buku Laporan Pencapaian SDGs*. Salatiga.
- Permatasari, I., Umbu, N., Nau, W., Hergianasari, P., Sosial, F. I., Komunikasi, I., Internasional, H., Kristen, U., & Wacana, S. (2018). PERAN NGO DALAM Mendukung *SDGs* Pendidikan Berkualitas (STUDI KASUS: PROJECT CHILD INDONESIA DI YOGYAKARTA (2018-2022)). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 19–34. <https://doi.org/10.56127/jukim.v>
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sutrisna, W. (t.t.). IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (*SDGS*) DESA. Dalam *JURNAL CAKRAWARTI* (Vol. 04).
- Sutrisni, K. (t.t.). *Peran Generasi Z Dalam Mewujudkan SDGs Di era Society 5.0 : Peran Generasi Z Sebagai Agent Of Change Dalam Mencapai Era Society 5.0 I Kadek Agus Aditya Putra 1 , I Putu Rai Purna Wibawa 2 , I Made Ode Subawa 3 , Ni.*

## B. Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasionalat Nomor KEP.136/M.PPPN/HK/12/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals Tahun 2021-2024